TERBIT SEJAK
1 SEPTEMBER 1962
PENDIRI/PERINTIS
Drs. H. Rusdy Toana (alm)
ISSN 0852-6427
Telepon: (0451) 423479

MERCUSUAR

KORANNYA RAKYAT SULTENG

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
286/DP-Terverifikasi/KIN/2018

SABTU, 7 NOVEMBER 2026

ECERAN: Rp. 5.000,- | LANGGANAN: Rp. 100.000,-

Nilai Tukar Petani di Sulteng Oktober 2026 Capai 109,17

PALU, MERCUSUAR - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai tukar petani (NTP) di Sulawesi Tengah pada Oktober 2026 mencapai angka 109,17 atau naik 0,71 persen dibandingkan bulan sebelumnya.



Daryanto

Kepala BPS Sulteng Daryanto di Kota Palu, Jumat, mengatakan peningkatan NTP itu terjadi disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 1,32 persen, lebih tinggi ketimbang kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,60 persen.

"Jadi, perkembangan ini secara dominan karena adanya lonjakan indeks pada subsektor hortikultura yang mengalami peningkatan signifikan hingga 18,46 persen yakni dari 157,30 pada September menjadi 186,34 pada Oktober 2026," kata Daryanto.

Ia mengemukakan peningkatan pada sektor hortikultura itu diakibatkan indeks harga diterima petani pada kelompok sayur-sayuran yang naik hingga 20,94 persen.

Menurut dia, untuk kelompok tanaman obat-obatan pun mengalami kenaikan 6,43 persen dan kelompok buah-buahan sebesar 2,05 persen.

"Tentunya, NTP secara umum mengalami kenaikan seperti subsektor tanaman pangan tercatat naik tipis 0,40 persen dari 90,16 menjadi 90,52, yang ditopang oleh kenaikan harga kelompok palawija sebesar 4,79 persen di

● Baca **NILAI** di Hal. 7





MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (6/11/2026). **FOTO: RAHEL NARDA CHATERINE**

Pemerintah Buka Seleksi CPNS November Ini

JAKARTA, MERCUSUAR - Pemerintah akan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada akhir tahun ini. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan proses pendaftaran CPNS dijadwalkan dimulai pada November ini.

"Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo juga menyebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini akan menjadi ketua panitianya.

Prasetyo menjelaskan rekrutmen CPNS ini dalam rangka melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS.

"Kita karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun," ucap dia.

Selain itu, ia menyebut ada program-program pemerintah prioritas yang membutuhkan pegawai.

"Oleh karenanya kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga," tuturnya.

Dia pun mengajak semua masyarakat yang memenuhi

● Baca **CPNS** di Hal. 7

apa dan siapa

ABRAHAM TADANUGI

Perluas Akses Kerja Penyandang Disabilitas



PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memperluas akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas guna meningkatkan kemandirian ekonomi dan memberikan kesempatan yang setara untuk memasuki dunia kerja.

"Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pencari kerja penyandang disabilitas. Mereka harus diberikan ruang dan kesempatan yang sama dengan orang lain," kata Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja (P5TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng Abraham Tadanugi di Palu, Jumat.

Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pemerintah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas paling sedikit

● Baca **DISABILITAS** di Hal. 7

Vale Indonesia Raih Apresiasi Minerba 2026

JAKARTA, MERCUSUAR – PT Vale Indonesia Tbk (Vale Indonesia), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), menerima apresiasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kepatuhan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batubara kategori Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Minerba 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Penghargaan untuk kategori pemegang IUPK itu diserahkan oleh Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi, kepada perwakilan Vale Indonesia.

Apresiasi ini menjadi pengakuan pemerintah atas kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban fiskal sekaligus mencerminkan pentingnya tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab.



PT Vale Indonesia Tbk, bagian dari MIND ID, menerima apresiasi dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM atas kepatuhan pembayaran PNBP sektor mineral dan batubara kategori IUPK. **FOTO : HUMAS PT VALE**

Komitmen tersebut tercermin dari realisasi PNBP Vale Indonesia yang mencapai 52,06 juta dolar AS sepanjang 2025. Angka ini meningkat 87,9 persen dibandingkan realisasi 2024 sebesar 27,70 juta dolar AS.

Kenaikan tersebut terutama ditopang pembayaran royalti produksi yang mencapai 45,55 juta dolar AS atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi fiskal perusahaan juga meningkat pada 2026. Selama sembilan bulan pertama tahun ini, Vale Indonesia mencatat pembayaran royalti dan retribusi sebesar 101,63 juta dolar AS. Jumlah tersebut meningkat 91,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 53,11 juta dolar AS.

Peningkatan pembayaran tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha perusahaan dan memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara.

Sejak berdiri pada 1968, Vale Indonesia mengembangkan kegiatan penambangan dan pengolahan nikel yang berawal dari Sorowako, Sulawesi Selatan. Kini, perusahaan juga mengembangkan portofolio

● Baca **VALE** di Hal. 7

Jaringan ATM Bersama Bank Sulteng Kembali Beroperasi

PALU, MERCUSUAR – Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) mengumumkan dengan resmi layanan jaringan ATM Bersama telah kembali beroperasi secara normal. Meski demikian, operasional layanan tersebut saat ini masih diberlakukan dengan ketentuan jam layanan terbatas.



SUASANA jumpa pers direksi Bank Sulteng, Kepala Divisi, pegawai Bank Sulteng bersama wartawan di Gedung Workshop Bank Sulteng, Jumat (6/11/2026). **FOTO: HUMAS BANK SULTENG**

Sementara itu, operasional kantor cabang di wilayah Sulawesi Tengah saat ini berjalan baik, sementara penyempurnaan sistem digital dan penyelesaian transaksi tertunda masih menjadi perhatian.

Direktur Utama Bank Sulteng, Hj. Ramiyatie, mengatakan, proses pemulihan dilakukan melalui asesmen menyeluruh dan peningkatan keamanan sistem.

Bank Sulteng, kata dia, juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan

● Baca **JARINGAN** di Hal. 7

Program 1 Orang 1 Rekening Terealisasi 2 Bulan Lagi

● **Isinya Saldo Rp 50.000**

JAKARTA, MERCUSUAR - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program 1 Orang 1 Rekening masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah menargetkan program pembukaan rekening gratis tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.



Airlangga Hartarto

"Yang rekening gratis masih dalam pematangan. Dalam dua bulan ini akan direalisasikan," ujar Airlangga dalam siaran pers Bakom RI, Kamis (5/11/2026) malam.

Program 1 Orang 1 Rekening ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pada akhir 2026. Airlangga menyebutkan, program ini dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sekaligus mempermudah penyaluran bantuan sosial agar lebih cepat dan tepat sasaran.

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan pembukaan rekening bagi sekitar 25,16 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1 hingga 4 yang belum memiliki rekening bank. Setiap rekening akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp

● Baca **REKENING** di Hal. 7

Kapolda Sulteng Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

TALISE, MERCUSUAR - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Kapolda Sulteng) Irjen Pol Rizal Irawan memimpin aksi Green Policing melalui kegiatan gotong royong membersihkan kawasan Pantai Penggaraman, Kampung Nelayan, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan melibatkan pejabat utama dan personel Polda Sulteng, komunitas ojek online (ojol), serta masyarakat setempat. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda bersama seluruh peserta turun langsung memungut sampah di sepanjang kawasan pantai. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.

Kapolda Sulteng juga mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan serta menjadikan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Achmad Muhaimin mengatakan, kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, aksi gotong royong tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan. IKI



KAPOLDA Sulteng, Irjen Pol Rizal Irawan memimpin aksi Green Policing melalui kegiatan gotong royong membersihkan kawasan Pantai Penggaraman, Kampung Nelayan, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Jumat (6/11/2026). FOTO: POLDA SULTENG

Rektor UIN Datokarama Dorong Kolaborasi Kampus Islam Asia



RAPAT Komite AIUA yang berlangsung di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (5/11/2026), FOTO: DOK HUMAS UIN DK

YOGYAKARTA, MERCUSUAR – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof. Lukman S. Thahir, mendorong penguatan kolaborasi akademik dan penelitian antarperguruan tinggi Islam di kawasan Asia melalui forum Asian Islamic Universities Association (AIUA).

Hal tersebut sejalan dengan keikutsertaan Lukman dalam Rapat Komite AIUA yang berlangsung di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (5/11/2026), bersama sejumlah rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Menurut Lukman, kerja sama antarperguruan tinggi Islam perlu diarahkan pada program konkret, seperti penelitian bersama, peningkatan publikasi ilmiah, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta pengembangan inovasi pendidikan.

Dalam forum AIUA sebelumnya di Jakarta pada Juni 2026, ia menilai organisasi tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi perguruan tinggi Islam, khususnya di kawasan ASEAN, dalam menghadapi tantangan global.

"Kegiatan ini sangat strategis dalam pengembangan perguruan tinggi keislaman yang berada di ASEAN," ujarnya dalam forum tersebut.

Lukman berharap jejaring kerja sama yang dibangun melalui AIUA dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kapasitas akademik, penelitian, serta sumber daya manusia.

Melalui partisipasi dalam Rapat Komite AIUA, UIN Datokarama berupaya memperluas jejaring internasional dan membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi Islam di berbagai negara. Langkah ini diharapkan mendukung peningkatan mutu dan daya saing universitas di tingkat global. */JEF

Kemenkum Sulteng Perkuat Layanan Hukum Responsif

BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti program dialog publik PASTI ADA SOLUSI episode ke-24 secara virtual, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum sekaligus memperoleh arahan penyelesaian dari pemerintah.

Sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat dalam dialog tersebut meliputi sengketa tanah, dugaan permasalahan akta notaris, kendala pembangunan rumah ibadah, hingga persoalan kewarganegaraan. Setiap pengaduan ditanggapi oleh pejabat dan unit teknis sesuai kewenangannya.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, mengatakan dialog tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga mampu memahami kebutuhan masyarakat.

"Di balik setiap pengaduan terdapat harapan masyarakat untuk memperoleh kejelasan dan perlindungan hukum. Pemerintah harus mampu membuka ruang komunikasi dan memberikan arahan penyelesaian sesuai kewenangannya," ujarnya.

Menurut Hendrik, keikutsertaan dalam program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan hukum yang lebih responsif dan humanis. Ia berharap semangat mendengarkan dan memberikan solusi dapat diterapkan dalam pelayanan di daerah sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan mengakses layanan hukum. */JEF



KANTOR Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti program dialog publik PASTI ADA SOLUSI episode ke-24 secara virtual, Jumat (6/11/2026). FOTO: DOK KEMENKUM SULTENG

Amerta Raffia Bag.
Menjual tali rafia dan karung grosir dan eceran per kilo. Melayani pengiriman luar kota.
Hub : Yuni : 0823 3596 0456

TRAVEL LINDA PRIMA
Melayani Tiket: Pesawat dan Kapal Laut, Reservasi Hub: Linda Prima Travel
Jl. WR. Supratman No. 54
(0451-4011417) 08114581123 (WA)

BELI PLASTIK BEKAS
Beli Plastik Bekas Kotor dan bersih, Botol, Tutup galon, Gelas Air Mineral, Botol Oli, Ale2 Montea dan Sejenisnya
Di Butuhkan Tanaga Kerja Bag. Gudang
Antar Lamaran kerja ke
AMERTA PLASTINDO
Jl. Rajamoili depan Tinta Kaili
CP YUNI : 082335960456









Festival 1000 Baki Salama

Tradisi Syukuran Masyarakat Kaili



WARGA menyantap makanan yang disajikan saat festival 1000 Baki Salama di Talise Valangguni, Palu, Jumat (6/11/2026). **FOTO: MUHAMMAD RIFKI/MS**

TALISE VALANGGUNI, MERCUSUAR- Festival 1000 Baki Salama Valangguni digelar di Huntap Kelurahan Talise Valangguni, Palu, Jumat (6/11/2026) malam. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat kaili.

Festival menjadi salah satu rangkaikan peringatan Hari Jadi Kelurahan Talise Valangguni ke-12. Ketua Panitia Festival 1000 Baki Salama Valangguni, Ilham S Tomuntina, mengatakan kegiatan awalnya merupakan acara syukuran masyarakat atau dikenal dengan istilah Molabe.

Namun, panitia kemudian mengemas tradisi tersebut dalam bentuk festival dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Menurut Ilham, tujuan utama kegiatan tersebut adalah menyatukan masyarakat dalam suasana kebersamaan.

"Tujuan utamanya hanya ingin menyatukan masyarakat dalam satu kebersamaan. Tidak ada tujuan lain di luar itu," kata Ilham.

Ia menjelaskan, tradisi Baki Salama merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat Kaili. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menyiapkan baki berisi berbagai macam makanan tradisional yang kemudian diniatkan untuk disedekahkan dan dinikmati bersama.

Tradisi tersebut menjadi simbol kepedulian, kebersamaan, dan silaturahmi antarmasyarakat.

Ilham mengungkapkan, pelaksanaan festival tahun ini merupakan kali ketiga sejak kegiatan tersebut dikemas dengan menghadirkan ribuan baki. Sebelumnya, kegiatan hanya dilaksanakan sebagai acara syukuran biasa. Pada pelaksanaan tahun ini, panitia berhasil mengumpulkan lebih dari 1.200 baki.

"Seluruh bahan makanan disiapkan secara swadaya oleh masyarakat. Ada satu rumah tangga yang membawa satu baki, ada juga dua rumah tangga yang bergabung menyiapkan satu baki," jelasnya. IKI

99 Persen Warga Palu Terdaftar BPJS Kesehatan



Susik

LERE, MERCUSUAR— Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Palu terus menunjukkan peningkatan. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu mencatat sekitar 99 persen penduduk telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, baik melalui jalur mandiri maupun program bantuan pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu turut menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program pembiayaan iuran yang ditanggung pemerintah daerah.

"Pemkot Palu menanggung iuran sekitar 40 ribu hingga 50 ribu jiwa," kata Susik di Palu, Jumat (6/11/2026).

Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Palu mengalokasikan anggaran sekitar Rp28 miliar setiap tahun. Anggaran itu digunakan untuk menjamin keberlangsungan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Susik menjelaskan, program bantuan iuran tersebut diprioritaskan bagi masyarakat kelompok Desil 1 hingga Desil 5, yakni kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan.

Menurutnya, upaya pemerintah tidak hanya sebatas mendaftarkan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga mendorong agar fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan ketika warga membutuhkan pelayanan medis.

"Kami minta masyarakat segera menggunakan fasilitas BPJS gratis ini," tegasnya.

Susik menambahkan, Dinsos Palu terus melakukan sosialisasi melalui berbagai dialog bersama masyarakat. Warga juga diimbau rutin memeriksa status kepesertaan agar jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemkot Palu berharap sinergi program pemerintah kota, provinsi, dan pusat semakin memperkuat perlindungan kesehatan serta meringankan beban masyarakat dalam memperoleh pelayanan pengobatan. UTM

Tiga Mahasiswa UIN Datokarama Presentasikan Riset di OASE



TIGA mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tampil dalam cabang lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ) pada Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 2026 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. **FOTO: DOK HUMAS UIN DK**

YOGYAKARTA, MERCUSUAR – Tiga mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tampil dalam cabang lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ) pada Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 2026 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Moh. Fauzi Adam, Rama Safawi, dan Rizka Liza Awalya. Mereka mempresentasikan hasil penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dengan pendekatan keilmuan di hadapan dewan juri.

Dalam presentasi tersebut, ketiganya menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan, membangun argumentasi, serta menjelaskan hasil kajian secara sistematis.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UIN Datokarama, Dr. Faisal Attamimi, M.Ag., mengapresiasi keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi ilmiah tingkat nasional tersebut. Menurutnya, KTIQ menjadi ruang untuk mengembangkan budaya penelitian, kemampuan berpikir kritis, dan daya saing akademik mahasiswa.

"Melalui kompetisi KTIQ, mahasiswa didorong untuk mengembangkan pemikiran ilmiah yang berpijak pada nilai-nilai Al-Qur'an. Kemampuan merumuskan masalah, membangun argumentasi, dan mempertanggung jawabkan hasil penelitian merupakan kompetensi penting yang harus terus diperkuat," ujarnya.

Faisal berharap pengalaman mengikuti OASE III dapat memotivasi mahasiswa untuk terus menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat tradisi akademik yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, penelitian, dan nilai-nilai keislaman. */JEF

Untad Perkuat Pembinaan Prestasi Mahasiswa



UNIVERSITAS Tadulako (Untad) memperkuat pembinaan prestasi mahasiswa melalui Sosialisasi Peningkatan Prestasi Mahasiswa Tingkat Regional, Nasional, dan Internasional yang berlangsung selama dua hari, 2–3 November 2026, di Media Center Untad. **FOTO: DOK HUMAS UNTAD**

TONDO, MERCUSUAR – Universitas Tadulako (Untad) memperkuat pembinaan prestasi mahasiswa melalui Sosialisasi Peningkatan Prestasi Mahasiswa Tingkat Regional, Nasional, dan Internasional yang berlangsung selama dua hari, 2–3 November 2026, di Media Center Untad.

Kegiatan bertema "Melalui Jalur Belmawa, Puspresnas, dan Mandiri dalam Rangka Mendukung IKU Untad 2026" tersebut diikuti jajaran pimpinan universitas, wakil dekan bidang kemahasiswaan, serta mahasiswa dari berbagai program studi.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Untad, Dr. Sagaf Djalalemba, M.P., menegaskan bahwa pendidikan mahasiswa tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik di ruang kuliah. Mahasiswa juga perlu mengembangkan kemampuan nonakademik sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan profesional.

Menurutnya, minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penelitian, teknologi tepat guna, seni, penalaran, dan olahraga perlu diarahkan melalui pembinaan yang terstruktur agar menghasilkan prestasi di tingkat regional, nasional, hingga internasional.

"Manusia paripurna adalah mereka yang tidak hanya menguasai ilmu dan kompetensi akademik, tetapi juga mempunyai kemampuan sebagai bekal hidup di luar ruang kelas," ujarnya.

Sagaf menjelaskan, prestasi mahasiswa melalui berbagai jalur pengembangan talenta merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Untad. Karena itu, universitas memberikan dukungan institusional dan administratif bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi maupun kegiatan pengembangan talenta.

Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk memastikan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut didukung surat tugas resmi dari fakultas sebagai bagian dari tanggung jawab institusi.

Melalui sosialisasi ini, Untad berharap pembinaan prestasi mahasiswa semakin terarah dan mampu mendorong keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi serta kegiatan pengembangan kapasitas di tingkat nasional maupun internasional.



Tajuk

Literasi Keagamaan Utuh untuk Persatuan

ERA digital telah mengubah lanskap perolehan informasi keagamaan secara drastis. Hari ini, siapa pun dapat dengan mudah mengakses terjemahan instan, potongan video ceramah, hingga narasi keagamaan dalam hitungan detik melalui gawai mereka. Namun, kemudahan akses ini menyimpan kerentanan serius.

Sebagaimana diingatkan oleh Ketua MUI Kota Palu, Prof. H. Zainal Abidin, ruang digital kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memenggal ayat-ayat Al-Qur'an dan menafsirkannya secara sepihak demi tujuan provokasi. Fenomena ini memicu kebingungan publik, melahirkan tafsir keliru, dan berpotensi memecah belah persatuan umat akibat hilangnya konteks yang utuh.

Kunci utama dalam membentengi diri dari provokasi digital adalah kesadaran teologis mendasar: membedakan antara Islam sebagai sumber mutlak dari Allah SWT dengan pemahaman keagamaan yang merupakan hasil ijtihad manusia.

Islam bersifat sakral dan universal, sementara pemahaman manusia terhadap teks suci sangat dipengaruhi oleh kapasitas ilmu, ruang, dan waktu. Ketika pemahaman manusia dianggap mutlak dan dipaksakan seragam, di situlah bibit-bibit intoleransi dan permusuhan mulai tumbuh.

Oleh karena itu, penafsiran agama tidak boleh dilepaskan dari perangkat metodologis yang sah. Memahami Al-Qur'an membutuhkan landasan keilmuan yang mapan, seperti penguasaan tata bahasa Arab, ulumul Qur'an, pemahaman asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), serta merujuk pada khazanah pemikiran ulama dan mazhab yang diakui.

Mazhab bukanlah agama itu sendiri, melainkan instrumen ilmiah yang digunakan para ulama terdahulu untuk menggali hukum dan hikmah dari nash. Menghargai keragaman mazhab dan pemahaman adalah wujud kedewasaan intelektual, bukan alasan untuk saling menuduh sesat.

Di tengah banjir arus informasi digital, prinsip tabayyun, mengecek dan meneliti kebenaran informasi menjadi harga mati. Umat Islam dituntut untuk tidak menelan mentah-mentah narasi keagamaan yang berseliweran di media sosial sebelum memverifikasi keabsahan sumber dan konteksnya. Sikap moderat (wasathiyah) harus dikedepankan, menjadikan keragaman pandangan sebagai kekayaan intelektual yang memperkaya khazanah umat, alih-alih sumber perpecahan.

Di sinilah peran strategis para imam masjid, mubaligh, dan ulama di tingkat akar rumput menjadi sangat krusial. Mereka memikul tanggung jawab moral untuk membina dan membimbing umat melalui majelis taklim dan pertemuan-pertemuan keagamaan secara konsisten. Pembinaan ini bertujuan agar masyarakat memiliki ketahanan pemahaman, sehingga tidak mudah goyah oleh provokasi instan berbasis potongan ayat di dunia maya.

Pada akhirnya, literasi keagamaan yang utuh adalah perisai terbaik di era digital. Dengan memadukan kedalaman ilmu, semangat tabayyun, dan sikap saling menghormati atas segala perbedaan, umat Islam di Kota Palu—dan Indonesia secara luas—dapat merawat harmoni sosial, menjaga persatuan bangsa, serta menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin di tengah gelombang disinformasi modern. TMU

Kekuasaan yang Mengintai Kekuasaan

Oleh : Dodi Sugianto

PENETAPAN mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional merupakan peristiwa yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum biasa. Peristiwa ini membawa pertanyaan mendasar tentang hubungan antara kekuasaan, kewenangan, dan pertanggungjawaban dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Temukan lebih banyak

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar sejumlah nomor komunikasi, termasuk milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha. Perkara ini masih berada dalam proses hukum sehingga seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah.

Namun, peristiwa ini memiliki dimensi ketatanegaraan yang sangat penting. Pihak yang berhadapan dengan proses hukum bukan sekadar aparat biasa, melainkan seseorang yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam institusi kepolisian dan kemudian dipercaya menempati posisi strategis di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo. Pertanyaannya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar: apakah kewenangan yang diberikan negara kepada pejabat publik benar-benar dijalankan untuk kepentingan negara, atau justru berpotensi digunakan di luar batas yang telah ditentukan hukum?

Dalam negara hukum, jabatan bukanlah kekuasaan pribadi. Jabatan merupakan amanah yang memiliki batas, tujuan, serta konsekuensi pertanggungjawaban. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab hukum dan moral yang harus melekat pada dirinya. Tidak ada jabatan yang dapat dijadikan alasan untuk berada di luar jangkauan hukum.

Peristiwa ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Sejak awal pemerintahan, masyarakat tentu memiliki harapan terhadap terciptanya stabilitas nasional, ketegasan penegakan hukum, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, serta pembenahan institusi negara. Akan tetapi, ketegasan pemerintah tidak cukup hanya diperlihatkan melalui tindakan terhadap seseorang yang sedang menjadi perhatian publik. Ketegasan yang sesungguhnya harus terlihat dari kemampuan pemerintah menjaga agar hukum bekerja secara independen, tanpa membedakan kedudukan, jabatan, hubungan politik, maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan.

Menurut pandangan penulis, persoalan ini tidak boleh hanya dibaca sebagai hubungan antara Presiden dan mantan Kapolri. Ada persoalan yang jauh lebih penting, yakni bagaimana negara mengawasi penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh aparatnya sendiri. Kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum. Kewenangan tersebut diberikan bukan untuk kepentingan pribadi pejabat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, dan bukan pula untuk membangun kekuasaan di luar mekanisme konstitusional. Kewenangan kepolisian harus selalu berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini, dugaan penyadapan ilegal menjadi persoalan yang sangat serius. Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional. Akan tetapi, kemampuan negara untuk mengakses komunikasi seseorang tidak berarti negara memiliki kebebasan tanpa batas untuk melakukan pengawasan. Ada perbedaan mendasar penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum dengan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman. Dalam perkembangan teknologi komunikasi, perlindungan tersebut juga harus dimaknai dalam konteks keamanan informasi dan privasi komunikasi. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari penggunaan kewenangan negara yang sewenang-wenang. Hak tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, tetapi juga bagi pejabat negara, jurnalis, pengusaha, aktivis, maupun siapa pun yang berada dalam wilayah hukum Indonesia.

RUANG EVALUASI

Penulis berpandangan bahwa perkara ini seharusnya membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap sistem penyadapan di lingkungan lembaga negara. Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang memerintahkan penyadapan, melainkan juga bagaimana mekanisme pemberian kewenangan, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang mengawasi penggunaan perangkat, bagaimana data dikelola, dan bagaimana pertanggungjawaban dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan. Sebuah sistem yang memberikan kemampuan kepada aparat untuk mengakses komunikasi masyarakat harus memiliki sistem pengawasan yang sebanding dengan besarnya kewenangan tersebut.

Persoalan ini juga membawa kita pada evaluasi terhadap reformasi kepolisian. Selama ini, pembicaraan mengenai reformasi Polri sering kali diarahkan pada pergantian pimpinan, perubahan struktur organisasi, peningkatan profesionalisme, dan pembenahan pelayanan publik. Padahal, reformasi yang sesungguhnya harus menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kewenangan diberikan, digunakan, dibatasi, dan diawasi. Pergantian seorang pimpinan tidak otomatis menyelesaikan persoalan kelembagaan. Demikian pula, penetapan tersangka terhadap pejabat tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Karena itu, pemerintahan Prabowo perlu menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk membangun sistem pengawasan penyadapan yang lebih kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit terhadap sistem teknologi penyadapan, evaluasi rantai pemberian kewenangan, penguatan pengawasan eksternal, perlindungan data komunikasi, serta pembenahan mekanisme pertanggungjawaban aparat merupakan langkah yang patut dipertimbangkan secara serius. Reformasi kepolisian juga harus diarahkan pada pembangunan budaya organisasi yang tidak menempatkan loyalitas personal di atas loyalitas terhadap konstitusi dan hukum.

Sebab, apabila penegakan hukum hanya berhenti pada penindakan terhadap individu tanpa memperbaiki sistem, maka negara hanya menyelesaikan akibat tanpa menyentuh akar persoalan. Pada akhirnya, yang sedang diuji ialah kualitas negara hukum Indonesia dalam menghadapi persoalan kekuasaan di dalam tubuhnya sendiri.

Sejarah suatu pemerintahan tidak semata-mata dinilai dari seberapa kuat pemimpinnya mengendalikan kekuasaan, tetapi juga dari seberapa besar keberaniannya memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak melampaui batas hukum. Hukum harus lebih tinggi daripada jabatan. Konstitusi harus lebih kuat daripada kepentingan kekuasaan. Dan negara harus selalu hadir untuk melindungi rakyat, bukan menciptakan ketakutan melalui kewenangan yang tidak terkontrol. Itulah ujian sesungguhnya bagi supremasi hukum dan demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo.*

Penulis adalah Dosen Tetap Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Perempuan & Kesehatan

Tips Merawat Rambut Setelah Bleaching

MERCUSUAR- Mengubah warna rambut menjadi lebih terang bisa menjadi cara menyenangkan untuk memberikan tampilan baru. Mulai dari blonde yang klasik hingga warna pastel yang playful, bleaching sering menjadi langkah awal untuk mendapatkan warna rambut impian. Namun, di balik hasil warna yang menarik, proses ini juga membutuhkan perhatian ekstra karena dapat memengaruhi kondisi rambut. Rambut yang sebelumnya terasa lembut bisa menjadi lebih kering, kasar, bahkan mudah patah. Karena itu, penting untuk mengetahui tips merawat rambut setelah bleaching agar tetap terasa sehat dan mudah diatur.



Di balik warna rambut yang lebih terang, proses bleaching ternyata bisa memberikan dampak pada kesehatan rambut. Bahan kimia dalam proses ini bekerja dengan mengangkat pigmen alami rambut, tetapi juga dapat memengaruhi lapisan pelindung dan struktur proteinnya. Akibatnya, rambut bisa kehilangan kelembapan, terasa lebih kering dan kasar, serta menjadi lebih mudah kusut. Tidak jarang rambut yang sebelumnya mudah diatur justru terasa lebih rapuh setelah bleaching.

Bukan hanya itu, perubahan struktur rambut juga dapat membuat batangnya kehilangan elastisitas sehingga lebih mudah patah dan bercabang. Bahkan, rambut yang patah dalam jumlah banyak bisa membuat tampilannya terlihat lebih tipis. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai kerontokan, padahal keduanya berbeda karena rambut patah terjadi pada batang, sedangkan kerontokan berasal dari akar. Karena itu, rambut setelah bleaching membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra agar kerusakannya tidak semakin parah.

Mengutip Herworld Indonesia, setelah mengetahui dampaknya, kuncinya adalah memberikan perawatan yang sesuai agar rambut tetap terasa lembut dan tidak semakin rapuh. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu masukkan ke dalam rutinitas perawatan rambut.

1. Gunakan Sampo dan Kondisioner Khusus Rambut Diwarnai

Langkah pertama dimulai dari rutinitas keramas. Pilih sampo dengan formula lembut yang ditujukan untuk rambut diwarnai atau mengalami kerusakan. Saat keramas, fokuskan penggunaan sampo pada kulit kepala agar bagian batang rambut tidak semakin kering. Setelah itu, aplikasikan kondisioner dari bagian tengah hingga ujung rambut untuk membantu mengurangi kusut dan membuatnya terasa lebih halus.

2. Rutin Menggunakan Hair Mask

Rambut yang terasa kering setelah bleaching membutuhkan kelembapan tambahan. Kamu bisa melengkapi rutinitas perawatan dengan menggunakan hair mask sesuai petunjuk pada kemasan. Pilih produk yang diformulasikan untuk rambut kering atau rusak agar rambut terasa lebih lembut, mudah disisir, dan tidak terlalu kasar.

3. Kurangi Penggunaan Alat Styling Bersuhu Tinggi

Catokan, curling iron, dan hair dryer memang bisa membantu menciptakan berbagai gaya rambut. Namun, penggunaan suhu tinggi secara berlebihan dapat menambah risiko kerusakan pada rambut yang sudah rapuh. Sebisa mungkin, biarkan rambut mengering secara alami. Jika ingin menggunakan alat styling, pilih suhu rendah atau sedang dan aplikasikan pelindung panas terlebih dahulu.

4. Sisir Rambut dengan Lebih Lembut

Rambut setelah bleaching cenderung lebih rapuh sehingga perlu diperlakukan dengan hati-hati, terutama saat masih basah. Gunakan sisir dan uraikan bagian yang kusut secara perlahan, mulai dari ujung rambut sebelum bergerak ke bagian atas. Hindari menggosok rambut terlalu kuat menggunakan handuk karena gesekan berlebih bisa membuat batang rambut semakin rentan patah.

5. Beri Jeda Sebelum Melakukan Bleaching Kembali

Meskipun ingin mencoba warna rambut baru, sebaiknya jangan terburu-buru melakukan bleaching ulang. Berikan waktu bagi rambut untuk mendapatkan perawatan terlebih dahulu, terutama jika kondisinya masih kering, rapuh, atau mudah patah. Kamu juga bisa berkonsultasi dengan penata rambut profesional untuk mengetahui apakah rambut sudah siap menjalani proses kimia berikutnya. Jika ujung rambut sudah bercabang, memangkas bagian tersebut dapat membantu menjaga tampilannya tetap rapi.

Merawat rambut setelah bleaching memang membutuhkan perhatian lebih, tetapi bukan berarti harus selalu menggunakan banyak produk. Mulailah dengan rutinitas sederhana yang sesuai dengan kondisi rambut, seperti menggunakan kondisioner, hair mask, dan membatasi penggunaan alat styling bersuhu tinggi. Dengan perawatan yang konsisten dan kebiasaan yang lebih lembut, rambut dapat terasa lebih halus, mudah diatur, dan terjaga dari kerusakan tambahan. Jadi, kamu tetap bisa menikmati warna rambut tanpa mengabaikan kesehatannya. HWI

MERCUSUAR
KORANNYA RAKYAT SULTENG

PENERBIT: PT MEDIA SUARA RAKYAT. **SIUPP:** No 172/SK/MENPEN/A.6/1986. **PIMPINAN UMUM/PERUSAHAAN:** Tri Putra Rusdy Toana. **PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB:** Tasman Banto. **WAKIL PEMIMPIN. REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Kartini Nainggolan. **DEWAN REDAKSI:** Tasman Banto, Temu Sutrisno, Khairudin, Kartini Nainggolan, **REDAKTUR:** Khairudin, Imam El Abrar, Jefrianto, Issrin Assagaf. **STAF REDAKSI:** Andi Besse, Rustam, Moh Rifki, Amar Sakti, M. Khassogi Toana, Harly. **LITBANG:** Dr.H.Andi Madukelleng, Temu Sutrisno. **BIRO SIGI:** Sanaji. **BIRO DONGGALA:** Wahid Agus. **BIRO TOLITOLI:** Ramlan, Ahmad Mohamamad Ali. **BIRO POSO:** Rusly Suwandi, Suhirman (Agen). **BIRO PARIGI MOUTONG:** Fathia, Agen: Ishak AP, Nirwana. **BIRO MOROWALI:** Patar Jupian Simanjuntak. Hamid. **BIRO MOROWALI UTARA:** Semuel Siombo, Ivan Tagora, Set Marson Kasio. **BIRO BANGGAI:** Sutopo Enteding, (Kep Biro), S Imam Muslik. **BIRO BANGKEP:** Abdullah. **BIRO BALUT:** Rahman. **PERWAKILAN JAKARTA:** Jl. Tebet Timur IV F No 6 Jakarta Selatan (Ahmad Aveus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung. Ramadhan). **PAGE DESIGN:** Wawan Karmawan (Koordinator), Darman (Design & Tata Letak). **STAF KEUANGAN:** Masdin (Manager), Pratiwi Yulistia. **PEMASARAN:** Herman (Koordinator), Narwanto, Zainudin. **IKLAN:** Pederia, Humaiyah, Helmy Jatmika. **SEKRETARIS REDAKSI:** Humaiyah, **TARIF IKLAN:** Warna (FC) Rp.50.000/ mm/kolom, B/W Rp.35.000/mm/kolom, Iklan Duka/Sosial Rp.10.000/mm/kolom, Iklan Baris Rp.10.000/baris (Mininal 2 baris & Maksimal 10 baris). **HARGA LANGGANAN di Kota Palu:** Rp 100.000/Bulan. **REKENING BANK:** BNI Cab. Palu: 008 185 7890, Bank Mandiri Cab. Palu: 151.000.495.345.8, Bank Sulteng: 001 01 07160 276, Segala bentuk transaksi keuangan/tagihan/pembayaran ke dan/atau dari perusahaan diakui sah apabila menggunakan kwitansi & cap asli serta ditandatangani pimpinan. **ALAMAT REDAKSI:** Jl.Yos Sudarso No.33 Palu - Sulteng, Telp:0451 - 423479 Fax: 0451 458164 www.harianmercusuar.com E_mail: mercu_red@ yahoo.co.id. iklanmercu01@gmail.com. DICETAK TRIMEDIA GRUP, Kantor Percetakan: Jl. Rusa No 36 PALU. Isi diluar tanggungjawab percetakan. **DEWAN MANAGEMEN TRIMEDIA:** Tri Putra Rusdy Toana, Mahmud Matangara, Suyanto, Temu Sutrisno

Abcandra Calon Tunggal Ketua

Asprov PSSI Sulteng, Berpeluang Aklamasi



PALU, MERCUSUAR–Abcandra Muhamad Akbar Supratman menjadi satu-satunya calon tetap Ketua Umum Asprov PSSI Sulawesi Tengah periode 2026–2030 yang dinyatakan lolos penjaringan menjelang pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI Sulteng.

Kepastian tersebut disampaikan Komite Pemilihan Kongres PSSI Sulteng melalui pengumuman hasil penjaringan yang dirilis di Palu, 2 November 2026.

Ketua Komite Pemilihan, Dr. Humaedi menjelaskan, sebelumnya terdapat dua bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran, yakni Abcandra Muhamad Akbar Supratman dan H. Anwar Hafid.

Namun, hingga batas akhir pengembalian formulir pada 1 November 2026 pukul 24.00 WITA, hanya Akbar Supratman yang menyerahkan berkas pendaftaran secara lengkap.

Setelah melalui proses verifikasi administrasi sesuai ketentuan, Komite Pemilihan kemudian menetapkan Akbar Supratman sebagai calon tetap yang memenuhi persyaratan untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Asprov PSSI Sulteng.

Dengan hanya satu calon tetap, proses pemilihan dalam kongres mendatang akan dilaksanakan melalui mekanisme aklamasi sesuai ketentuan Statuta PSSI.

Dengan demikian, Akbar Supratman berpeluang memimpin organisasi sepak bola Sulawesi Tengah untuk periode empat tahun ke depan, 2026–2030. */CLG



SALAH satu laga Donggala United vs Persekat Tegal di laga ujicoba, Jumat (6/11/2026). FOTO : IST

Uji coba

Donggala United Imbangi Persekat Tegal Jelang Liga Nusantara

MERCUSUAR, JAWA TENGAH – Donggala United (DU) bermain imbang 1-1 melawan Persekat Tegal dalam laga uji coba di Jawa Tengah, Jumat (6/11/2026). Uji coba ini menjadi bagian dari persiapan akhir DU menjelang laga pembuka Liga 3 Nusantara menghadapi Pasuruan United.

Dalam pertandingan tersebut, Donggala United berhasil unggul lebih dahulu melalui gol Ibarza pada menit ke-44. Namun, Persekat Tegal mampu menyamakan kedudukan sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Pelatih kepala Donggala United, Ridwan Saragih, mengatakan uji coba tersebut menjadi simulasi pertandingan dengan atmosfer kompetisi untuk mengukur kesiapan tim.

Berbicara kepada Mercusuar seusai pertandingan, Ridwan mengungkapkan tim pelatih langsung menggelar pertemuan evaluasi bersama staf kepelatihan.

"Uji coba tadi kita sudah simulasi seperti kompetisi. Kemudian seusai uji coba, kita juga langsung meeting dengan staf pelatih. Kita langsung evaluasi, masih ada beberapa PR yang perlu kita benahi, terutama di finishing dan transisi," ujar Ridwan.

Meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, Ridwan mengaku bersyukur karena timnya sudah memiliki kerangka pemain.

"Alhamdulillah, kita juga sudah punya kerangka tim. Artinya, kita masih ada waktu lima hari lagi latihan. Di lima hari ini kita akan siapkan game plan untuk menghadapi Pasuruan United dalam pembukaan Liga 3 Nusantara," lanjutnya.

Sisa waktu persiapan tersebut akan dimanfaatkan untuk mematangkan strategi sekaligus membenahi kekurangan tim agar DU bisa tampil maksimal pada pertandingan perdana.

Ridwan juga meminta dukungan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu dan Kabupaten Donggala, agar timnya mampu memberikan hasil terbaik di kompetisi nasional tersebut.

"Mohon doa dari masyarakat Sulawesi Tengah, Palu, dan khususnya Donggala agar Donggala United bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Sulawesi Tengah. Amin," tutupnya. CLG

Singgani Cup III 2026 Lariang

PSM Poboya Tewaskan Pejuang 874 FC dan Lolos ke 8 Besar

MERCUSUAR – PSM Poboya FC memastikan satu tempat di babak 8 Besar Piala Singgani Cup III 2026 setelah mengalahkan Pejuang 874 FC dengan skor 2-0 pada laga babak 16 Besar di Lapangan 10 November, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Jumat (6/11/2026).

Dua gol kemenangan PSM Poboya FC masing-masing dicetak Ardandi dan Indri.

Gol pembuka lahir pada menit ke-21. Berawal dari akselerasi Ardandi di dalam kotak penalti, pemain PSM Poboya itu sukses melepaskan sepakan ke tiang jauh yang gagal dijangkau penjaga gawang lawan.

PSM kemudian menggandakan keunggulan melalui sepakan jarak jauh Indri. Dari jarak sekitar 25 meter, tendangannya meluncur deras dan bersarang di pojok gawang Pejuang 874 FC.

Pertandingan berlangsung dalam kondisi hujan yang terus mengguyur lapangan sejak babak pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Meski tidak sampai menyebabkan genangan air, kondisi rumput yang licin membuat beberapa pemain sempat kehilangan keseimbangan dan terjatuh.

Memasuki babak kedua, pelatih PSM Poboya, Akilos, melakukan sejumlah pergantian pemain. Gilbert Mawei masuk menggantikan Saldi Ale, Afghan menggantikan Naldy Renaldy, serta Dewa menggantikan Indri.

Pejuang 874 FC yang diperkuat prajurit TNI berusia muda tampil dengan semangat dan stamina yang nyaris tak habis sepanjang pertandingan. Namun, PSM Poboya FC mampu memperlihatkan permainan lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang.

Ketua PSM Poboya FC, Moh. Mikdad, hadir langsung menyaksikan perjuangan timnya dari bangku cadangan PSM. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan langsung kepada para pemain yang sedang berjuang mengamankan tiket ke babak berikutnya.

Dengan kemenangan ini, PSM Poboya FC kini menunggu calon lawan di babak 8 Besar, yakni pemenang pertandingan antara Doda FC kontra Gastik Tikke.

PSM Poboya pun semakin dekat dengan target melangkah lebih jauh di turnamen sepak bola Piala Singgani Cup III 2026. CLG



SKUAD PSM Poboya saat mengalahkan Pejuang 874 FC. FOTO : ISSRIN ASSEGAF/MS



ARDANDI (kiri) dipeluk rekannya usai cetak gol pertama PSM Poboya. FOTO : ISSRIN ASSEGAF/MS

Program Jemput Sakit Pulang Sehat

Bupati Morowali: Jangan Cuma Slogan


Iksan Baharudin Abdul Rauf

MOROWALI, MERCUSUAR – Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf meminta program Jemput Sakit Pulang Sehat terus ditingkatkan. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak hanya menjadi slogan.

Program unggulan Pemkab Morowali itu sebelumnya mengantarkan daerah meraih penghargaan nasional Anugerah Citra Negeri 2025 kategori Citra Daerah Sehat dan Sejahtera. Menurut Iksan, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Jemput Sakit Pulang Sehat ini jangan cuma slogan. Di tahun 2025 kita mendapatkan salah satu penghargaan dari program Jemput Sakit Pulang Sehat ini. Saya berpesan untuk selalu ditingkatkan," ujar Iksan, di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Jumat (6/11/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari penghargaan yang diterima. Hal terpenting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program perlu terus diperhatikan, agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Terutama warga yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan penanganan medis.

Iksan berharap seluruh jajaran terkait tetap berkomitmen menjalankan program tersebut. Dengan begitu, penghargaan yang telah diraih dapat diikuti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. TAR

Kabupaten Banggai

Sebelas Ranperda Masuk Agenda Legislasi 2027


BUPATI Banggai, Amirudin (kiri) memberikan penjelasan terhadap 11 Ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun anggaran 2027. FOTO: SUTOPO ENTEDING/MS

BANGGAI, MERCUSUAR–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Bersama DPRD Banggai mengusulkan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Banggai Tahun 2027.

Usulan tersebut terdiri atas lima Ranperda inisiatif pemerintah daerah, lima Ranperda inisiatif DPRD Banggai, serta satu Ranperda daftar kumulatif terbuka.

Bupati Banggai, Amirudin dalam rapat paripurna DPRD Banggai dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati tentang penetapan Propemperda Tahun 2027, Rabu (4/11/2026), menjelaskan bahwa 11 usulan judul Ranperda tersebut telah disepakati bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banggai dan Bagian Hukum Setda Banggai.

Amirudin menyebut, seluruh usulan juga telah melalui tahapan harmonisasi judul di Biro Hukum Provinsi Sulteng dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulteng.

Menurutnya, harmonisasi merupakan proses pengkajian, penyelarasan, dan pemantapan konsepsi serta judul regulasi agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih dengan aturan lainnya, serta mampu menjawab kebutuhan hukum di daerah.

Adapun lima Ranperda usulan pemerintah daerah meliputi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan kepada pemerintah daerah; Grand Design Pembangunan Kependudukan; Kepala Desa dan Perangkat Desa; perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa; serta Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Sementara lima Ranperda inisiatif DPRD Banggai meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Penyelenggaraan Pangan; Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Pencegahan Perilaku Seksual; serta Kebudayaan Daerah.

Selain 10 Ranperda tersebut, terdapat satu Ranperda daftar kumulatif terbuka yang merupakan usulan pemerintah daerah, yakni tentang pembentukan Kecamatan Toili Makmur, Kecamatan Teluk Kebetean dan Kecamatan Nuhon Jaya.

Amirudin menjelaskan, daftar kumulatif terbuka merupakan Ranperda tertentu yang dapat diajukan di luar tahapan perencanaan Propemperda pada umumnya, karena adanya kebutuhan hukum tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang memungkinkan Propemperda kabupaten/kota memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan dan desa.

Amirudin menegaskan penetapan Propemperda merupakan langkah penting dan strategis, dalam mendorong kemajuan Kabupaten Banggai, khususnya dari sisi pembentukan regulasi daerah.

Menurutnya, keberadaan regulasi yang tepat akan berdampak terhadap pengambilan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam mewujudkan kemakmuran dan kemajuan masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar penyusunan regulasi daerah berjalan selaras dengan visi misi pembangunan daerah dan mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," tutur Amirudin. TOP

Pelatihan Jurnalistik Dasar

SMAN 7 Sigi Dorong Murid Melek Literasi Digital


SMAN 7 Sigi melaksanakan Pelatihan Jurnalistik Dasar bagi murid kelas X dan XI. FOTO: IST.

SIGI, MERCUSUAR — SMAN 7 Sigi sukses menggelar kegiatan Pelatihan Jurnalistik Dasar bagi murid kelas X dan XI, yang diinisiasi untuk meningkatkan keterampilan literasi dan publikasi digital, pada 6–7 November 2026.

Pelatihan yang dikoordinir Saidin tersebut diikuti 50 orang peserta. Acara secara resmi dibuka oleh Wakil Kepala SMAN 7 Sigi, Simson.

Dalam sambutannya, Simson menyampaikan kegiatan tersebut merupakan pelatihan jurnalistik pertama kalinya di SMAN 7 Sigi. Ia menegaskan, pelatihan tersebut sangat penting untuk membangun pemahaman dan mengasah kemampuan menulis murid di era digital.

"Menulis bukan sekadar merangkai kata, tetapi sarana untuk memberikan informasi terkait kegiatan sekolah, penyebarluasan ide, dan gagasan agar bisa dipublikasikan serta diketahui oleh banyak orang," ujar Simson.

Ia menambahkan, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, hasil karya dan potensi murid dari wilayah Dolo Barat dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke luar daerah.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber berpengalaman untuk membekali para murid dengan berbagai keahlian praktis. Fatimah selaku guru bahasa Indonesia SMAN 7 Sigi membawakan materi mengenai tips dan trik membaca serta menulis cepat. Selain itu, Sekretaris PWI Sulteng Temu Sutrisno hadir menyampaikan materi dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan berita, serta pemahaman seputar etika digital.

Peserta juga mendapatkan pembekalan teknis mengenai seni fotografi jurnalistik, yang disampaikan langsung oleh Moh. Misbahuddin selaku fotografer senior Harian Mercusuar.

Di sela-sela acara pembukaan, Temu Sutrisno secara simbolis menyerahkan 10 eksemplar buku berjudul 'Jejak Perjuangan Rusdy Toana' kepada pihak SMAN 7 Sigi untuk melengkapi koleksi perpustakaan sekolah. TMU



Fadlin Jaring Aspirasi Warga Karawana


FOTO bersama usai reses Anggota DPRD Sigi, Fadlin, di Balai Desa Karawana, Kamis (5/11/2026). FOTO: SANAJI/MS

SIGI, MERCUSUAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi dari Partai Gerindra, Fadlin, melaksanakan reses menjaring aspirasi Warga Desa Karawana, Kecamatan Kecamatan Dolo, Kamis (5/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Desa Karawana menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan pupuk dan penimbunan lapangan sepakbola. Aspirasi tersebut disampaikan karena kondisi pupuk langka, mengingat dalam tiga kali musim tanam warga hanya sekali mendapat jatah pupuk.

Fadlin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan masyarakat merupakan masukan penting, yang akan menjadi bahan untuk diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, kelangkaan pupuk di Desa Karawana menjadi prioritas untuk diperjuangkan ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorhun) Sigi.

Fadlin menambahkan, kegiatan reses merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota DPRD, untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat dan mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan.

"Aspirasi yang disampaikan masyarakat nantinya akan menjadi bahan dalam pembahasan dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan pemerintah daerah," kata Fadlin.

Melalui pelaksanaan reses masa sidang pertama tahun sidang 2026–2027 ini, Fadlin menegaskan komitmen untuk terus menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat. AJI

Hakeem Jeffries Bakal Jadi Ketua DPR Kulit Hitam Pertama AS

MERCUSUAR - Pimpinan Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat, Hakeem Jeffries, akan mencetak sejarah sebagai orang kulit hitam pertama yang menjadi ketua lembaga legislatif ini di pemerintahan Donald Trump.

Posisi itu bakal dipegang Jeffries usai "partai biru" dipastikan menguasai kursi Kongres menyusul hasil pemilihan umum sela pekan ini. Anggota Partai Demokrat merayakan kemenangan tersebut dengan meneriakkan slogan-slogan "ketua! ketua!"

"Ini bukan momen partisan. Ini adalah momen patriotik," kata Jeffries, dikutip AP News.

Jeffries mengatakan anggota DPR fraksi Demokrat memahami bahwa rakyat sangat ingin perubahan transformatif.

"Kami mendengar Anda. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan perubahan dramatis yang pantas Anda dapatkan," ungkap Jeffries.

Jeffries akan menghadapi pemungutan suara dalam Sidang Kongres pada 3 Januari. Jika dinominasikan dan terpilih, ini akan jadi pertama kalinya anggota parlemen kulit hitam memegang palu ketua DPR. Kemungkinan ini sangat terbuka lebar setelah Demokrat menang di pemilu sela.

Naiknya Jeffries di posisi tersebut juga akan jadi tonggak sejarah yang sudah dinantikan selama lebih dari 150 tahun. Jika berhasil, Jeffries akan mengambil alih jabatan Mike Johnson, ketua DPR sebelumnya yang berasal dari Partai Republik.

Jeffries merupakan politikus senior AS yang pernah menjabat Pemimpin Fraksi Minoritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia terpilih menjadi anggota DPR mewakili wilayah New York sejak 2013.

Pada 2023, dia terpilih menggantikan Nancy Pelosi sebagai pemimpin fraksi Demokrat di DPR. Ini sekaligus membuat Jeffries menjadi orang kulit hitam pertama dalam sejarah AS yang mempin partai besar di Kongres. CNN



PEMIMPIN Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat, Hakeem Jeffries. **FOTO: REUTERS/ JONATHAN ERNST**

VPNS dari hal 1

syarat untuk mendaftar dan mengikuti setiap proses yang ada. "Dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS," ujar Prasetyo.

PPPK GURU JADI PENUH WAKTU

Sementara itu Pemerintah bersama DPR RI memutuskan meningkatkan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, mulai dari guru, dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), hingga tenaga kesehatan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah dan DPR melakukan serangkaian pembahasan lintas kementerian dan sektor.

"Yang pertama, sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut adalah perluasan dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang baru mencakup tenaga PPPK paruh waktu di bidang pendidikan atau guru. Setelah melakukan sejumlah perhitungan dan pembahasan, kata Prasetyo, pemerintah akhirnya memutuskan memperluas pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu ke berbagai profesi lainnya.

"Ya, itu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ya, kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan, ya, menyebutnya ya, atau tenaga pelaksana lain," tutur Prasetyo.

Prasetyo menegaskan, keputusan itu adalah hasil finalisasi pembahasan berbagai persoalan kepegawaian yang sebelumnya disampaikan kepada DPR maupun pemerintah.

"Dan alhamdulillah setelah melakukan diskusi yang cukup panjang lintas sektor karena memang masalah kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, nah, ada beberapa kesepakatan yang alhamdulillah hari ini sudah bisa kita rumuskan," pungkas Prasetyo. KPC

VALE dari hal 1

usaha di Bahodopi, Sulawesi Tengah, serta Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Perluasan kegiatan usaha tersebut memperkuat posisi Vale Indonesia dalam rantai pasok nikel nasional sekaligus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah operasionalnya.

Sebagai pemegang IUPK, perusahaan tidak hanya berkewajiban membayar royalti dan kewajiban pertambangan lainnya sesuai ketentuan, tetapi juga memiliki kewajiban pembagian laba bersih kepada pemerintah pusat dan daerah.

Bagi perusahaan, pertumbuhan usaha dan kontribusi terhadap penerimaan negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pengembangan sumber daya mineral diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat industri nasional, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi negara dan masyarakat.

42 Apresiasi untuk Pelaku Usaha Minerba

Dalam laporannya, Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Totoh Abdul Fatah, menjelaskan bahwa Apresiasi Minerba 2026 memberikan 42 penghargaan kepada badan usaha atas kontribusi dan kinerja dalam pengelolaan subsektor mineral dan batubara.

Sebanyak 42 apresiasi tersebut terdiri atas 13 penghargaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor batubara, 15 penghargaan PPM sektor mineral, delapan penghargaan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), serta enam penghargaan kepatuhan pembayaran PNBP.

Khusus kategori kepatuhan PNBP, apresiasi diberikan berdasarkan kelompok perizinan usaha pertambangan, yakni IUP Mineral, IUP Batubara, IUP BUMN, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan IUPK.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi badan usaha lainnya untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, media, akademisi, dan masyarakat agar subsektor mineral dan batubara dapat memberikan manfaat optimal bagi bangsa.

Semangat kolaborasi tersebut sejalan dengan tema Minerba Convex 2026, yakni "Membangun Bangsa, Memberdayakan Masyarakat".

PERKUAT TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS

Head of Tax Vale Indonesia, Chandra Yudha, mengatakan apresiasi dari pemerintah menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kewajiban fiskal seiring perkembangan kegiatan usaha.

"Bagi Vale Indonesia, apresiasi dari pemerintah atas kontribusi PNBP merupakan kehormatan sekaligus amanah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terbaik dalam pengelolaan sumber daya mineral. Kami meyakini bahwa pertumbuhan kegiatan usaha harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kewajiban kepada negara, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan daerah sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33," ujar Chandra.

Ia menambahkan, kontribusi fiskal merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung pengembangan industri mineral nasional yang berkelanjutan.

Menurut dia, pembangunan industri mineral membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui penguatan tata kelola, pemenuhan kewajiban fiskal, serta pengembangan proyek-proyek strategis, Vale Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi Indonesia," jelasnya.

Melalui apresiasi tersebut, Vale Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan pengelolaan sumber daya mineral memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. TIN

NILAI dari hal 1

tengah harga padi yang relatif konstan saat ini," ucapnya.

Ia menuturkan secara keseluruhan angka NTP tanaman pangan masih tercatat sebagai yang terendah di antara subsektor lainnya.

Untuk penurunan NTP dialami oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat yang terkoreksi 1,26 persen menjadi 112,29, serta subsektor peternakan yang turun tipis 0,39 persen menjadi 106,83.

"Penurunan juga terjadi pada subsektor perikanan yang terkoreksi sebesar 4,47 persen dari 100,04 menjadi 95,57 yang dipengaruhi oleh penurunan indeks harga yang diterima kelompok perikanan tangkap hingga 3,97 persen, khususnya penangkapan ikan di laut yang turun 4,01 persen," sebutnya.

Sementara itu, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian (NTUP) Sulawesi Tengah pada Oktober 2026 juga tercatat menguat 1,30 persen menjadi 114,23 dari bulan sebelumnya sebesar 112,76.

"NTUP yang mengukur perbandingan harga diterima tanpa memperhitungkan pengeluaran konsumsi rumah tangga ini mencerminkan daya tukar hasil produksi usaha tani terhadap biaya produksi yang dikeluarkan juga membaik," kata dia.

Indeks harga yang dibayar petani naik 0,60 persen karena adanya kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,77 persen, terutama pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang naik 1,16 persen.

Kenaikan biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) relatif terkendali dengan peningkatan tipis 0,02 persen. ANS

DISABILITAS dari hal 1

dua persen, sedangkan perusahaan swasta paling sedikit satu persen.

Ia mengatakan untuk mendukung penyerapan tenaga kerja, pemerintah memberikan pembekalan keterampilan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

Selain itu, pihaknya juga membantu dalam mempertemukan calon pekerja penyandang disabilitas dan perusahaan untuk memastikan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Pendampingan juga dilakukan untuk memantau kondisi pekerja sekaligus mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi selama bekerja.

"Kita selalu berkomunikasi dengan mereka atau pendampingnya, baik orang tua, saudara, maupun pihak lainnya sehingga kondisi mereka ketika bekerja tetap terpantau oleh kami. Apabila ada masalah, kita bisa segera melihat dan mengetahui kondisi serta permasalahan yang mereka hadapi di tempat kerja," ujar dia.

Menurut dia, Disnakertrans Sulteng juga melakukan sosialisasi secara langsung hingga tingkat desa dan kelurahan dengan membagikan selebaran kepada pemerintah desa mengenai kesempatan pelatihan dan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah desa, kata dia, diharapkan turut terlibat dalam mendorong warga penyandang disabilitas yang ingin meningkatkan kompetensi maupun memperoleh informasi lowongan pekerjaan.

Ia menyebutkan sebagian penyandang disabilitas yang telah terserap di dunia kerja bekerja pada bidang administrasi. Untuk itu, ia berharap melalui pendampingan dan pelatihan ini, semakin banyak penyandang disabilitas yang bekerja dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja. ANS

JARINGAN dari hal 1

(OJK) untuk memastikan sistem yang digunakan memenuhi ketentuan dan memiliki ketahanan terhadap risiko keamanan digital.

"Sekarang asesmennya dilakukan secara keseluruhan. Kami berharap asesmen dari BI dan OJK dapat segera selesai dan Insyaallah di Bulan November ini benar-benar sudah pulih secara keseluruhan," kata Ramiyatie dalam konferensi pers di Gedung Workshop Bank Sulteng, Jalan Tinombala, Kota Palu, Jumat (6/11/2026).

Sebelumnya, gangguan sistem berdampak pada sejumlah layanan transaksi Bank Sulteng. Nasabah tidak dapat menggunakan beberapa fasilitas seperti biasanya, sehingga sebagian transaksi harus dilakukan langsung melalui kantor cabang.

Layanan mobile banking juga belum sepenuhnya pulih, sedangkan transaksi tertentu melalui jaringan ATM Bersama masih memerlukan penanganan.

Ramiyatie menjelaskan, manajemen melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem untuk memastikan keamanan transaksi nasabah.

Menurutnya, proses pemulihan layanan digital membutuhkan pemeriksaan dan pengujian sebelum dapat dioperasikan sepenuhnya. Namun, ia memastikan pelayanan melalui kantor cabang tetap berjalan.

Sementara itu, layanan ATM Bersama sendiri telah memperoleh persetujuan untuk diaktifkan kembali. Manajemen berharap proses pengaktifan dapat terealisasi setelah seluruh tahapan yang diperlukan terpenuhi.

Ramiyatie mengaku telah mengunjungi sejumlah kantor cabang untuk memeriksa langsung kondisi operasional. Ia menyebut pelayanan kepada nasabah, termasuk di wilayah desa, tetap berlangsung.

"Walaupun belum semuanya pulih, setidaknya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bantuan yang diberikan telah membantu mengaktifkan kembali layanan Bank Sulteng," ujarnya.

Di tengah proses pemulihan, Bank Sulteng juga telah menambah sekitar 74 unit ATM. Penambahan tersebut dilakukan, antara lain, untuk menggantikan mesin ATM yang sudah lama.

Khusus di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Bank Sulteng memiliki 10 unit ATM dan dua kantor pelayanan. Manajemen menilai jumlah tersebut masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat di wilayah tersebut.

Ramiyatie mengatakan penempatan ATM baru harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, biaya operasional, serta manfaat bisnis. Perkembangan layanan digital juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebutuhan mesin ATM ke depan.

Meski demikian, transaksi tunai masih banyak digunakan masyarakat di kawasan industri Bahodopi. Sebagian pekerja masih memilih menarik gaji dalam jumlah besar setelah menerima pembayaran.

Bank Sulteng juga mempertimbangkan rencana pengembangan kantor di Bahodopi. Namun, rencana tersebut masih memerlukan perhitungan, terutama karena harga tanah di wilayah itu relatif mahal.

Terkait mekanisme pengaduan nasabah, kata Ramiyatie, Bank Sulteng memiliki sistem pengaduan nasabah, standar penyelesaian keluhan, serta layanan call center. Pengaduan yang berkaitan dengan kondisi layanan saat ini juga ditangani oleh unit terkait.

Ia memastikan manajemen memberikan perhatian serius terhadap proses pemulihan. Seluruh unit terkait telah ditugaskan untuk mempercepat perbaikan sistem sekaligus menjaga pelayanan kepada nasabah tetap menjadi prioritas.

Ramiyatie juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pemerintah, DPR, dan media atas dukungan selama proses pemulihan. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari risiko reputasi bank.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank Sulteng," ujarnya. HAI/*

REKENING dari hal 1

50.000 dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 1,28 triliun.

Selain pembukaan rekening gratis, pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah turut berencana memberikan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 900.000 untuk 13,3 juta pekerja.

"Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 900.000 bagi 13,3 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta atau di bawah UMP (upah minimum provinsi)," kata Airlangga.

Selanjutnya, Airlangga membeberkan, pemerintah juga memberikan insentif transportasi selama masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Insentif diberikan untuk moda transportasi udara, kereta api, kapal laut, serta angkutan penyeberangan.

"PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ditanggung pemerintah 100 persen untuk tiket pesawat ekonomi domestik per 22 Desember sampai dengan 10 Januari. Ini targetnya untuk 3,75 juta penumpang penerbangan kelas ekonomi," kata Airlangga.

Untuk transportasi kereta api, pemerintah memberikan diskon tiket sebesar 30 persen dengan sasaran sekitar 1,04 juta penumpang.

Insentif juga diberikan kepada penumpang kapal laut milik PT Pelni dengan sasaran sekitar 414.000 orang. Sementara itu, tarif jasa kepelabuhanan di 14 pelabuhan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry digratiskan dengan target penerima manfaat sebanyak 1,42 juta penumpang.

"Periodenya 22 Desember sampai dengan 10 Januari," ujar Airlangga. KPC

OJK Terbitkan 2 Peraturan Baru di Sektor PPDP



ILUSTRASI. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono. FOTO: KONTAN/ FERRY SAPUTRA

MERCUSUAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan 2 Peraturan OJK (POJK) baru di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP). Secara rinci, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan OJK telah menerbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ogi menyebut POJK itu diterbitkan untuk menyesuaikan kerangka solvabilitas dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 dan sejalan dengan standar internasional Insurance Capital Standard (ICS). Dia bilang ada sejumlah ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut.

"Ketentuannya, antara lain mengatur kewajiban rasio solvabilitas minimum, pengaturan modal yang tersedia, pengaturan pinjaman subordinasi, serta penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Kamis (6/11/2026).

Lebih lanjut, Ogi menyampaikan OJK juga sudah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2026 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Ogi menerangkan POJK itu dilatarbelakangi pentingnya ketersediaan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan. Ditambah, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri PPDP.

Terkait kinerja PPDP, Ogi sempat menyampaikan total aset industri PPDP mencapai Rp 2.989,58 triliun per September 2026. Nilainya meningkat 3,9% secara Year on Year (YoY). Adapun total investasi sektor PPDP mencapai Rp 2.299,37 triliun per September 2026. Nilainya meningkat 4,2% secara YoY. Sementara itu, OJK mencatat, jumlah pelaku PPDP sebanyak 576 entitas, dengan jumlah konvensional sebanyak 543 dan syariah sebanyak 33. KONTAN

Yield Kredit Sejumlah Bank Justru Menurun

MERCUSUAR - Pertumbuhan kredit industri perbankan masih terjaga menjelang akhir 2026. Namun, ekspansi penyaluran kredit tersebut belum sepenuhnya diikuti peningkatan imbal hasil atau yield kredit. Sejumlah bank justru mencatatkan penurunan yield di tengah persaingan suku bunga dan perubahan komposisi portofolio kredit.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit industri perbankan per September 2026 tumbuh 13,26% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp 9.245 triliun. Meski masih tumbuh dua digit, angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan 13,65% YoY pada Agustus 2026. Salah satu bank yang mengalami penurunan yield kredit adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Secara bank only, yield kredit Bank Mandiri tercatat sebesar 7,03% pada kuartal III-2026, turun dibandingkan 7,67% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan segmen, kredit korporasi mencatatkan yield paling rendah, yakni 6,17% pada kuartal III-2026.

Sementara itu, kredit mikro dan payroll memberikan imbal hasil tertinggi sebesar 10,5%, disusul kredit konsumer sebesar 7,39%. Di sisi lain, ekspansi kredit Bank Mandiri tetap agresif. Hingga September 2026, kredit korporasi perseroan tumbuh 22,5% secara tahunan. Penyaluran kredit tersebut difokuskan pada sejumlah sektor utama, antara lain manufaktur, pemerintah, dan konstruksi. Bank Mandiri juga memperbesar pembiayaan pada sektor yang mencatatkan pertumbuhan tinggi, seperti energi dan air serta properti investasi.

Penurunan yield juga dialami PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Per Agustus 2026, yield kredit BCA tercatat sebesar 7,93%, turun 0,9% secara tahunan. Dari sisi segmen, kredit konsumer BCA mengalami kontraksi 2,2% secara tahunan pada kuartal III-2026. Sebaliknya, kredit korporasi menjadi pendorong ekspansi terbesar dengan pertumbuhan 20,9%, diikuti kredit usaha kecil dan menengah (UKM) atau small and medium enterprise (SME) sebesar 15,4%.

Secara keseluruhan, penyaluran kredit BCA hingga September 2026 tetap tumbuh 12,6% secara tahunan. Pembiayaan perseroan terutama mengalir ke sektor manufaktur yang tumbuh 23,6%, perdagangan 19,3%, jasa bisnis 13,5%, dan transportasi 9%. Pertumbuhan tersebut turut ditopang fasilitas kredit investasi dan modal kerja korporasi yang masing-masing meningkat sekitar 20%.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, penurunan yield kredit umumnya dipengaruhi persaingan suku bunga antarbank, penyesuaian bunga kredit, serta meningkatnya porsi kredit korporasi dan investasi. Menurut dia, kredit korporasi dan investasi umumnya menawarkan bunga lebih rendah dibandingkan kredit konsumsi dan UMKM. Perubahan komposisi portofolio tersebut turut menekan rata-rata yield kredit perbankan.

"Yield kredit diperkirakan masih tertekan hingga akhir 2026, walau penurunannya berpotensi melambat," ujar Trioksa kepada Kontan, Jumat (6/11/2026).

Sementara itu, Direktur OK Bank Indonesia Efdinal Alamsyah mengatakan, perseroan membukukan yield kredit sebesar 10%. Imbal hasil tersebut ditopang oleh penyaluran Kredit Tanpa Agunan (KTA). Dalam menyalurkan kredit, Efdinal menyebut OK Bank tidak menetapkan sektor usaha tertentu sebagai prioritas utama. Perseroan lebih mengutamakan prospek usaha, kemampuan pembayaran, serta profil risiko masing-masing debitur. Melalui strategi tersebut, OK Bank berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, kualitas aset, dan profitabilitas secara berkelanjutan. KONTAN

Survei BI: Harga Rumah Naik Tipis



PENGUNJUNG melihat maket perumahan dan apartemen yang dipajang di sebuah gerai dalam pameran properti REI Mandiri Property Expo 2018, Jakarta (18/11). FOTO: IST

MERCUSUAR - Bank Indonesia (BI) mencatat harga properti residensial alias rumah di pasar primer tumbuh 0,58 persen pada kuartal III 2026 secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) sebesar 0,58 persen secara tahunan tersebut melambat dibandingkan kuartal II 2026, yang tumbuh 0,69 persen.

Meskipun harga rumah masih bisa naik, penjualan hunian justru anjlok 8,43 persen pada kuartal III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia menunjukkan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan III 2026 tumbuh terbatas," tulis BI dalam laporan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) kuartal III 2026, Jumat (6/11).

BI mencatat perlambatan terutama dipengaruhi kenaikan harga rumah tipe menengah dan besar. Harga rumah tipe menengah tumbuh 0,63 persen, melambat dari 0,83 persen pada kuartal sebelumnya. Sementara, rumah tipe besar tumbuh 0,57 persen, turun dari 0,68 persen.

Selanjutnya, harga rumah tipe kecil tumbuh 0,55 persen, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 0,49 persen.

Secara spasial, dari 18 kota yang disurvei BI, tujuh kota mengalami perlambatan pertumbuhan harga dan satu kota mengalami penurunan IHPR secara tahunan.

Harga rumah di Yogyakarta turun 0,05 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding pertumbuhan 0,77 persen pada kuartal II 2026.

Sementara itu, harga rumah di Pontianak tumbuh 1,49 persen, meski melambat dari 2,35 persen pada kuartal sebelumnya.

Harga rumah di Pekanbaru dan Samarinda juga meningkat, masing-masing tumbuh 3,64 persen dan 0,79 persen secara tahunan.

Dari sisi penjualan, BI mencatat penjualan rumah anjlok 8,43 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka tersebut lebih dalam dibandingkan kontraksi kuartal sebelumnya sebesar 2,36 persen.

Penurunan terjadi pada seluruh tipe rumah. Penjualan rumah tipe besar merosot 10,78 persen. Penjualan rumah tipe kecil dan menengah masing-masing amblas 4,95 persen dan 15,42 persen.

Secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq), penjualan properti bahkan jatuh 11,10 persen, padahal pada kuartal II 2026 berhasil tumbuh 9,39 persen.

BI juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam pengembangan dan penjualan properti residensial. Pertama, kenaikan harga bahan bangunan menjadi hambatan terbesar dengan porsi 26,24 persen.

Kedua, masalah perizinan dan birokrasi sebesar 17,17 persen. Ketiga, kendala suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 15,71 persen. Keempat, hambatan terkait perpajakan 10,54 persen. Kelima, tingginya uang muka KPR sebesar 10,05 persen.

Sementara itu, suku bunga KPR tercatat relatif stabil di level 7,47 persen pada kuartal III 2026. Dari sisi pembiayaan pengembang, dana internal perusahaan masih menjadi sumber utama pembangunan properti residensial dengan pangsa 73,94 persen dari total kebutuhan pembiayaan.

Sementara pinjaman perbankan berkontribusi 17,98 persen dan pembayaran konsumen 8,08 persen.

Adapun dari sisi konsumen, mayoritas pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema KPR dengan pangsa 70,68 persen. Pembelian melalui tunai bertahap mencapai 20,96 persen, sedangkan pembayaran tunai sebesar 8,37 persen.

Di tengah turunnya penjualan rumah, nilai KPR secara tahunan justru tumbuh 4,80 persen pada kuartal III 2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan 4,70 persen pada kuartal sebelumnya.

Secara kuartalan, nilai KPR tumbuh 1,40 persen, lebih tinggi dari 1,24 persen pada kuartal II 2026. CNN

INFO PASAR MODAL

Garuda Indonesia Rights Issue 248,71 Miliar Saham



ILUSTRASI pesawat Garuda Indonesia (GIAA). Dok. Garuda Indonesia. FOTO: IST

MERCUSUAR - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menyiapkan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) III. BUMN angkutan udara menyiapkan right issue, dengan menerbitkan 248,71 miliar saham Seri E senilai Rp25 per saham.

Mengutip keterbukaan informasi, Kamis (5/11/2026), PT Danantara Asset Management (DAM), pemegang saham utama Garuda Indonesia akan menyetorkan modal dalam bentuk selain uang. Inbreng disiapkan berupa saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI).

Objek penyetoran modal dalam bentuk inbreng pada right issue ini adalah 82,10 miliar saham Seri B GMFI. Jumlah itu setara 65,77% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GMFI, yang direncanakan disetorkan oleh DAM.

Pengalihan saham GMFI dari Garuda Indonesia kepada DAM telah tuntas dilaksanakan. PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports. Perseroan sebelumnya telah melepas seluruh kepemilikan sahamnya di GMFI kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, untuk kemudian diteruskan kepada DAM.

Aksi pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan melalui mekanisme pembagian dividen atau dividend in specie pada 2 November 2026.

Angkasa Pura Indonesia dalam laporannya menyebut transaksi penjualan ini bukan merupakan repurchase agreement. Perseroan pun menegaskan bahwa kepemilikan saham atas GMFI sebelumnya bersifat langsung,

Diketahui Angkasa Pura Indonesia mengalihkan seluruh sahamnya di GMFI sebanyak 82.100.173.900 lembar, atau setara 65,77% hak suara. Nilai pengalihan saham ini mencapai Rp5,66 triliun. ***

